

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Yulianto. (2010). *Sistem Hukum Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aditya Prasetya. (2020). *Analisis Penyebab Terjadinya Sengketa Pajak dalam Proses Pemeriksaan Berdasarkan Undang-Undang KUP*. Skripsi. Fakultas Hukum, Jakarta Universitas Indonesia.
- A.M. Donner. (1954). *Bestuursrecht* (Zwolle. Tjeenk Willink dan J.H. van Kreveld, *Rechter en Bestuur* (Deventer: Kluwer, (1983) mengenai doktrin *onslag van rech*
- Andi Hamzah. (2018). *Hukum Acara dan Pembuktian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aristoteles. (2009). *Nicomachean Ethics*. Diterjemahkan oleh D. Ross. Oxford: Oxford University Press.
- Aristoteles. (1999). *Nicomachean Ethics*, terjemahan oleh Terence Irwin Indianapolis: Hackett Publishing, Buku V.
- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budi Santoso. (2020). *Hukum Pajak dan Penyelesaian Sengketa Pajak* Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Gunadi. (2019). *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Gustav Radbruch. (1950). *Legal Philosophy*. Oxford: Clarendon Press.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hans Kelsen. (1945). *General Theory of Law and State*, terj. Anders Wedberg Cambridge: Harvard University Press.
- Hans Kelsen. (1967). *Pure Theory of Law*, transl. Max Knight. Berkeley: University of California Press.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I. Jakarta: Pustaka Harapan.
- John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Revised Edition. Cambridge: Harvard University Press.
- John Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press
- John Rawls. (2001). *Justice as Fairness: A Restatement*, ed. Erin Kelly. Cambridge: Harvard University Press.
- John Rawls. (2006). *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara Modern*. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan. (2022). *Teori dan Praktik Sengketa Pajak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Lawrance M. Friedman. (1998). *American Law: An Introduction*, Second Edition. New York: W.W. Norton.
- Lonna Yohanes Lengkong. (2020). “Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil Dalam Hukum Acara Perdata”. Penerbit Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press. Jakarta

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Mahkamah Agung sebagai Judex Juris ataukah Judex Factie: Pengkajian Asas, Teori, Norma, dan Praktik*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI.
- Manan, Bagir. 2004. *Peradilan Administrasi Negara*. Jakarta: FH UKI Press.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*, Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi offset.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). Lawrence M. Friedman, (1975) *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation. Yogyakarta: Liberty.
- Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Notonagoro. (1983). *Pancasila: Dasar Filsafat Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Notonagoro. (2018). *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Falsafah Hidup Bangsa*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Paul Craig. (2016). *Administrative Law*, 8th ed. London: Sweet & Maxwell.
- Philip C. Jessup. (1974). *The Law of International Responsibility*, New York: Oceana Publications.
- Philipus M. Hadjon. (1990). *Asas-Asas Perlindungan Hukum bagi Rakyat dalam Hukum Administrasi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon. (1992). *Asas-Asas Hukum Administrasi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Philipus M. Hadjon. (2002). *Hukum Administrasi Negara dan Tata Pemerintahan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban.
- Philipus M. Hadjon dkk. (2019). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti

- R. Subekti. (1989). *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta.
- Rochmat Soemitro. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Rochmat Soemitro. (1990). *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Eresco.
- Rochmat Soemitro. (2012). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama
- Rochmat Soemitro. (2018). *Asas dan Dasar Perpajakan* (Bandung: Refika Aditama.
- Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock. (1993). *An Introduction to Taxation*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutjipto Rahardjo. (2002). *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: UGM Press.
- Y. Sri Pudyatmoko. (2019). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Per Undang-Undangan

- Republik Indonesia. 1983. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62.

- Republik Indonesia. 2020. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27.
- Republik Indonesia. 1986. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079.

C. Jurnal

- Dina Oktaviani. (2022). Analisis Sanksi Administrasi dalam Ketentuan KUP sebagai Penyebab Sengketa Pajak. *Jurnal Hukum dan Perpajakan Indonesia*.
- Rizky Ramadhan. (2021). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Mekanisme Banding di Pengadilan Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.
- Susanto. 2021. *Administrasi Pajak dan Etika Pemerintahan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 12 No. 2
- Khifni, M., Widiarty, W. S., & Butarbutar, S. 2025. *Kepastian hukum dalam penegakan keadilan perpajakan atas sengketa transfer pricing pada Pengadilan Pajak*. Jurnal Sosial dan Teknologi, 5(4): 1019–1039.
- Tomson Situmeang. *Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kehakiman di Indonesia*. Jurnal UKI, P-ISSN: 0215-8922, 2022

D. Skripsi, Artikel, Media online dan Website

Direktorat Jenderal Pajak. 2021. *Data empiris ttg tingkat kemenangan WP dan efektivitas Pasal 26A ayat (4) disusun dari laporan internal Direktorat Jenderal Pajak dan analisis putusan Pengadilan Pajak selama periode 2015–2020.*

Direktorat Jenderal Pajak. 2023. *Laporan Statistik Sengketa Pajak.*

United Nations. 1945. *Statute of the International Court of Justice*. In: *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*. San Francisco: United Nations.

Pengadilan Pajak: <https://www.pengadilanpajak.go.id/putusan>

Pengadilan Pajak. 2024. *Laporan Profiling Sekretariat Pengadilan Pajak.*

Putusan MA No. 123/K/PJ/2020 tentang Sengketa Pajak.

Winda Larasati. (2019). *Peran Pengadilan Pajak dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak akibat Perbedaan Penafsiran Fiskus dan Wajib Pajak*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.